

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak dulu dalam kehidupan masyarakat seseorang tidak mungkin terhindar dari kehidupan bernegara. Negara merupakan agen masyarakat untuk mengatur hubungan-hubungan yang terjadi di dalam masyarakat dengan tujuan agar ketertiban dalam kehidupan bernegara dapat terpelihara. Semua itu dimaksudkan untuk meminimalisasi kekalutan yang mungkin terjadi di dalam masyarakat, sebab manusia cenderung untuk membutuhkan kerjasama, namun seringkali mereka terjebak dalam perbedaan kepentingan. Di samping mengendalikan kekuatan-kekuatan yang bertentangan satu sama lain, Negara juga mengintegrasikan kegiatan warga masyarakat ke arah tercapainya tujuan-tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional, maka dituntut adanya sebuah kekuatan politik (Sukarsa, 2007: 145).

Pada awal abad ke 17, bangsa Indonesia mulai berada di bawah cengkraman dan kekuasaan kolonialisme asing. Diawali oleh Portugis, kemudian dilanjutkan oleh Belanda. Dengan berbagai arogansinya, bangsa penjajah dari wilayah Eropa itu menjajah dan menindas rakyat. Begitupun juga dengan penjajahan yang dilakukan oleh penjajah dari wilayah Asia, yaitu Jepang. Para penjajah tidak hanya mengurus sumber daya alam bumi nusantara yang melimpah tetapi juga mengeksploitasi seluruh jiwa rakyat Indonesia.

Sebelum tahun 1900, reaksi dan perlawanan rakyat Indonesia bersifat lokal, negatif (mengundurkan diri ke tempat atau daerah yang tidak terjangkau oleh kekuasaan penjajah dan mencari perlindungan kepada ilmu gaib), irrasional, dan sporadis. Rakyat Indonesia percaya akan datangnya juru selamat yang akan membebaskan mereka dari penjajah. Pergerakan sosial yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya adalah gerakan-gerakan yang diilhami oleh agama. Sartono

Norris Noer Herwandy, 2014

*KIPRAH K.H ABDUL HALIM DALAM BIDANG POLITIK TAHUN 1912-1955*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kartodirjo (1992) menjelaskan mengenai jenis-jenis gerakan sosial yang dilakukan oleh rakyat Indonesia diantaranya adalah gerakan juru selamat (*mesianisme*), gerakan Ratu Adil (*millenarianisme*), pribumi (*nativisme*), perang jihad (*fisabilillah*). Sartono Kartodirjo (1992) menyebutkan bahwa:

“Banyak gerakan sosial, termasuk kerusuhan, pemberontakan, sektarisme, dapat diklasifikasikan sebagai gerakan keagamaan, karena gejala-gejala tersebut pada umumnya cenderung untuk berhubungan dengan gerakan-gerakan yang diilhami oleh agama atau menggunakan cara-cara agama untuk mewujudkan tujuan-tujuan gaib mereka. Kebanyakan pergolakan tersebut cenderung mempunyai segi-segi yang bercorak keagamaan”(Kartodirjo, 1992: 10).

Sesudah tahun 1900 situasi politik di Indonesia mulai memasuki fase pergerakan nasional. Fase ini merupakan bentuk reaksi dan perlawanan terhadap penjajah Belanda yang coraknya berbeda dengan reaksi dan perlawanan sebelum tahun 1900. Mengutip pendapat dari Moedjanto dari buku yang ditulis Miftahul Falah:

Moedjanto (Miftahul Falah, 2008 :38) mengemukakan bahwa “...setelah tahun 1900 reaksi dan perlawanan terhadap penjajah memperlihatkan sifat nasional, positif, diorganisir secara teratur dan rasional, dan merencanakan masa depan”

Kunci perkembangan pada masa ini adalah munculnya ide-ide baru mengenai organisasi. Ide baru tentang organisasi meliputi bentuk-bentuk kepemimpinan yang baru. Pada masa ini terbentuk suatu jenis kepemimpinan Indonesia yang baru dan suatu kesadaran diri yang baru, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar. Para pemimpin yang baru terlibat dalam pertentangan yang sengit satu sama lain, sedangkan kesadaran diri yang semakin besar telah memecah belah kepemimpinan ini lewat garis-garis agama dan ideologi.

Untuk mengakhiri perlakuan pihak kolonial Belanda yang sungguh menyakitkan itu, segenap rakyat melakukan pergerakan. Pada masa itu banyak tokoh-tokoh yang bermunculan pada masa itu untuk menentang dan menjadi pembangkit

gerakan-gerakan kesadaran untuk menentang pihak kolonial Belanda. Diantaranya adalah, Haji Samanhoedi, Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, E.F.E Douwes Dekker Danudirdjo Setiabudi, Haji Agus Salim, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Mas Mansur, K.H. Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah, dan lain-lain.

Kiprah para tokoh tersebut dalam membangkitkan kesadaran nasional untuk menentang pihak kolonial Belanda adalah dengan cara mendirikan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Diantaranya adalah Haji Samanhoedi yang mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI) yang bergerak dalam bidang ekonomi. SDI didirikan dalam rangka untuk membela kepentingan para pedagang Indonesia dari saingan pedagang Cina yang mendapat prioritas dari pemerintah kolonial Belanda. Hal ini diperkuat oleh pendapat Suryanegara (2009) yang menyebutkan bahwa:

“Pembangkit gerakan kesadaran nasional melalui Pasar dengan membangun Sjarikat Dagang Islam-SDI di Surakarta, 16 Oktober 1905, Senin Legi, 16 Sya`ban 1323 sebagai jawaban terhadap upaya imperialisme modern yang menjadikan Indonesia sebagai market-pasar dan *raw material resources*-sumber bahan mentah industri penjajah Barat”(Suryanegara, 2009:352).

Kemudian, pada tahun 1911 suatu partai politik yang bernama Indische Partij (Partai Hindia) didirikan oleh seorang Indo-Eropa yang radikal bernama E.F.E Douwes Dekker (Setiabudhi, 1850-1879), seorang keluarga jauh E. Douwes Dekker (Multatuli). Partai ini mempermuklumkan suatu nasionalisme `Hindia` dan menuntut kemerdekaan. Dua orang Jawa terkemuka, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat (kemudian disebut Ki Hajar Dewantara, 1889-1959), bergabung dengan Douwes Dekker (Ricklefs, 1999: 260).

Dalam bidang politik, terutama politik Islam ada HOS Tjokroaminoto yang mendirikan Organisasi Syarekat Islam. Syarekat Islam adalah organisasi yang bercorakan Islam dan bergerak dalam bidang politik. Organisasi Syarekat Islam didirikan pada tanggal 11 November 1911 di Solo oleh Haji Oemar Said (HOS)

Tjokroaminoto. Hal ini diperkuat oleh pendapat Noer (1982) yang menyatakan bahwa:

*“Asal usul dan pertumbuhan gerakan politik di kalangan umat Islam di Indonesia dapat dikatakan identik dengan asal-usul dan pertumbuhan Sarekat Islam”* (Noer,1982:114).

Berasal dari Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905, HOS Tjokroaminoto meleburnya menjadi Syarekat Islam (SI) sekaligus sebagai wadah dan ciri umum bangsa Indonesia dalam menggerakkan rakyat. Tampilnya SI sebagai organisasi pergerakan benar-benar dilandasi oleh semangat nasionalisme. Berlaku untuk semua komponen bangsa tanpa terbatas pada ikatan sosial, budaya, adat dan latar belakang sejarah. SI juga tidak terjebak pada pembatasan golongan sosial (Santosa, 2010: 9).

Semenjak berdiri, organisasi ini begitu gigih mengusahakan tercapainya tujuan kenegaraan, kebenaran, dan keadilan. Perkembangan SI begitu pesat. Pada waktu itu SI menjadi kekuatan politik yang amat terasa pengaruhnya. Pada tahun 1916, SI mengadakan kongres nasional dan dirumuskan sifat politik SI yang disahkan pada kongres II. Isi pokok organisasi SI antara lain mengharapkan hancurnya kapitalisme dan memperjuangkan agar rakyat nantinya akan dapat melaksanakan pemerintahan sendiri. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kahin (2013) yang menyebutkan bahwa:

*“Organisasi nasionalis Indonesia pertama yang berorientasi politik-Sarekat Islam tiba-tiba saja muncul ditengah-tengah suasana penjajahan yang tenang dengan kekuatan yang mencengangkan, tidak hanya bagi orang Belanda tetapi juga orang Indonesia. Dalam empat tahun sejak didirikan pada 1912, anggota Sarekat Islam mencapai 360.000 orang. Organisasi tersebut memiliki program politik yang bertujuan untuk menggapai pemerintahan sendiri. Menjelang 1919, anggotanya mencapai hampir dua setengah juta orang”*(Kahin, 2013:93).

Perjuangan gigih yang dilakukan organisasi Syarekat Islam telah membangkitkan rakyat di berbagai daerah untuk bergabung. Syarekat Islam yang

dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto telah menggerakkan jiwa dan menggelorakan semangat serta cita-cita rakyat Indonesia sampai ke pelosok desa-desa. Salah satu motor penggerak organisasi Syarekat Islam adalah K.H. Abdul Halim. K.H. Abdul Halim membentuk cabang organisasi Syarekat Islam di Majalengka dan mulai memimpin Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Menurut Falah (2009) menyebutkan bahwa:

*“Sarekat Islam inilah organisasi pergerakan nasional yang memiliki hubungan erat dengan K. H. Abdul Halim ”* (Falah, 2008:29).

Melalui organisasi Syarekat Islam (SI), K.H. Abdul Halim bergelut dengan dunia politik yaitu politik Islam. Pergerakan Pergerakan yang dilakukan oleh Syarekat Islam (SI) dibawah pimpinan HOS Tjokroaminoto itu mendorong juga kepada gerakan *Jam`iyah Ganatul Muta`limin* yang dipimpin K.H. Abdul Halim untuk masuk dan bergabung menjadi aktivis Syarekat Islam (SI) (Sukarsa,2007:66).

K.H. Abdul Halim merupakan sosok ulama yang berasal dari Majalengka. K.H. Abdul Halim adalah salah seorang figur ulama yang telah memelopori gerakan pembaharuan Islam. K.H. Abdul Halim memiliki jasa yang besar di dalam mendorong kesadaran di kalangan masyarakat Muslim pada masa itu untuk bangkit mengejar ketertinggalannya dalam berbagai bidang melalui serangkaian usaha-usaha pembaharuan yang dilakukannya.

Otong Syatori merupakan nama asli dari K.H. Abdul Halim. Ia berasal dari keluarga ulama yang religius dan taat dalam beragama. Ia lahir di Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka pada hari Sabtu Pon menurut perhitungan Jawa, 4 Syawal 1304 Hijriyah atau tanggal 26 Juni 1887. Ia merupakan anak bungsu dari delapan bersaudara. Ayahnya adalah K.H. Muhammad Iskandar yang merupakan seorang penghulu kewedanaan di Jatiwangi. Ibunya adalah Hj. Siti Mutmainah binti Imam Safari (Sukarsa, 2007:1).

Sejak masa kanak-kanak, Otong Syatori tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Pendidikannya hanya dari pesantren ke pesantren. Dalam perjalanannya

menuntut ilmu, Otong Syatori memang tidak pernah duduk di sekolah, baik sekolah pribumi apalagi sekolah kolonial. Bukan karena di Majalengka pada waktu itu tidak ada sekolah, tetapi karena memang pilihannya ke pesantren (Falah, 2008:8).

Pada tahun 1908, ketika menginjak usia 21 tahun, ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama. Selanjutnya ia pun bermukim Mekah selama tiga tahun. Ketika berada di Mekah, K.H. Abdul Halim bertemu dengan Ahmad Sanusi, Mas Mansur, Abdul Wahab Hasbullah. Pertemuan keempat pemuda asal Indonesia tersebut berlanjut dengan persahabatan. Mereka seringkali terlibat diskusi dalam bidang pendalaman ilmu agama dan juga perkembangan kondisi tanah air yang sedang dijajah oleh Belanda. Sepulang dari Mekah, Otong Syatori merubah namanya menjadi Abdul Halim.

Karena merasa berasal dari satu daerah (Pasundan) dengan Ahmad Sanusi maka pertemuan tersebut berkembang menjadi sebuah persahabatan. Hubungan khusus dengan K. H. Ahmad Sanusi terus berlanjut ketika mereka sudah kembali ke tanah air. Dari hubungan itulah, kelak di kemudian hari lahir sebuah organisasi yang bernama Persatuan Umat Islam (PUI) yang merupakan organisasi massa hasil fusi antara PUI dan PUII (Falah, 2008: 19).

Sebelum berkiprah dalam bidang politik, K.H Abdul Halim mendirikan beberapa organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Diantaranya adalah pada tahun 1911 K.H. Abdul Halim mendirikan *Majlisul Ilmi* yang bergerak di bidang pendidikan dan ekonomi. Melalui organisasi tersebut, ia akan berupaya bekerja keras untuk mengembangkan pendidikan dan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan martabat dan taraf hidup rakyat. Melalui pendidikan, K.H. Abdul Halim percaya bahwa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang menimpa bangsa Indonesia akan bisa diperbaiki (Sukarsa, 2007: 27).

Seiring dengan berkembangnya *Majlisul Ilmi* dan bertambahnya para santri, maka pada tahun 1912 K.H. Abdul Halim membentuk sebuah organisasi yang diberi

nama *Hayatul Qulub* (Kehidupan Hati). Organisasi *Hayatul Qulub* tidak saja hanya bergerak di bidang pendidikan, tetapi juga bergerak di bidang sosial dan ekonomi. (Wanta, 1986: 6). Pada saat itu, kehidupan ekonomi rakyat sedang berada dalam persaingan dengan para pedagang Cina yang sedang menguasai pasar.

Pada tanggal 16 Mei 1916 K.H. Abdul Halim mendirikan perhimpunan yang diberi nama *Jam`iyah Tanatul Muta`limin* yang artinya Pertolongan Kepada Para Pelajar. Pendirian perhimpunan ini setelah mendapat saran dari Sayid Hasyim Asy-syimi yang datang berkunjung dari Jakarta untuk melihat madrasah yang baru didirikan oleh K.H. Abdul Halim (Wanta, 1986: 7).

Para pengurus *Jam`iyah Tanatul Muta`limin* sebagian besar masuk dan bergabung menjadi anggota Syarekat Islam setelah K.H. Abdul Halim memimpin Syarekat Islam cabang Majalengka. Kemudian atas anjuran dari HOS Tjokroaminoto pada bulan November 1916 terjadilah perubahan nama *Jam`iyah Tanatul Muta`limin* menjadi Persyarikatan Oelama (PO). Kemudian, pada 21 Desember 1917, PO mendapat pengakuan sebagai organisasi yang berbadan hukum (Wanta, 1986: 11).

K.H. Abdul Halim merupakan seorang sosok ulama pejuang yang menginginkan adanya perubahan di kalangan umat Islam. Sebagai seorang ulama, K.H. Abdul Halim berjuang dengan menggunakan kekuatan pemikirannya. Pendidikan merupakan aspek yang diperjuangkan oleh dirinya, karena melalui pendidikan perbaikan umat Islam dapat diwujudkan. Untuk melaksanakan gagasan tersebut maka pada bulan April 1932 K.H. Abdul Halim mendirikan tempat pendidikan yang terpisah dan khusus yang diberi nama Santi Asromo (Sukarsa, 2007:103).

Ketika Jepang datang dan menjajah Indonesia, K.H. Abdul Halim tetap terus berjuang untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Terhadap Jepang, sikap K.H. Abdul Halim berbeda dengan sikapnya kepada Pemerintah Hindia Belanda. K. H. Abdul Halim memilih bersikap kooperatif dan mau bekerja sama dengan penguasa militer Jepang. Hal ini dibuktikan dengan bersedianya K.H. Abdul

Halim menjadi anggota *Chuo Sangi In* dan Pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dinamakan *Dokuritsu Zyunbi Choosakai*.

Selain tantangan melawan penjajah Jepang, para pejuang juga berjuang melawan tantangan dari dalam. Seperti yang dilakukan dalam menghadapi tokoh Pasundan (Jawa Barat) bernama Soeria Kartalegawa yang menggagas terbentuknya Negara Pasundan. K.H. Abdul Halim menentang gagasan tersebut dan menghendaki untuk tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. K.H. Abdul Halim tampil sebagai ketua delegasi penyampai resolusi kepada Komisaris Republik Indonesia Serikat (RIS) agar Negara Pasundan dilebur masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukarsa, 2007: 152).

Ketika Indonesia sudah merdeka, K.H. Abdul Halim masih tetap aktif dalam dunia politik. Partai politik yang diikuti oleh K.H. Abdul Halim adalah partai Masyumi yang merupakan wadah aspirasi politik sesuai dengan hati nurani, karena berazaskan syariat Islam. Pada saat Masyumi berjaya, K.H. Abdul Halim menjabat sebagai jajaran pengurus besar Masyumi (Sukarsa, 2007:147). Kemudian pada tahun 1955 K.H. Abdul Halim menjadi anggota Konstituante berdasarkan hasil Pemilihan Umum pada tahun 1955.

K.H. Abdul Halim merupakan salah seorang figur ulama dari Majalengka yang memiliki jasa yang besar di dalam mendorong kesadaran di kalangan masyarakat Muslim, bahkan bangsa Indonesia untuk bangkit mengejar ketertinggalannya dalam berbagai bidang melalui serangkaian usaha-usaha pembaruannya. Perjuangan K.H. Abdul tidak hanya dalam bidang agama, pendidikan dan sosial. Ia juga berjuang dalam bidang politik. Selama berkiprah dalam dunia politik, ia telah berjuang secara maksimum dalam usahanya dengan kegiatan pengembangan politik Islam. K.H. Abdul Halim telah menumbuhkan kesadaran berpolitik dan bernegara di kalangan umat Islam. Kiprah K.H. Abdul Halim dalam

bidang politik praktis senantiasa mencoba menampilkan Islam secara modern dalam rangka mengantisipasi perkembangan zaman.

Namun, ketokohan K. H. Abdul Halim sepertinya kalah populer dibandingkan dengan ulama pejuang seangkatannya, seperti K. H. Hasyim Asy'ari (NU) dan K. H. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah). Generasi muda, khususnya di luar lingkungan PUI kurang begitu mengenal ulama pejuang dari Majalengka. Sekalipun jika ada yang mengenal, umumnya hanya mengetahui bahwa K.H. Abdul Halim adalah tokoh dalam bidang pendidikan. Padahal selain berjuang dalam bidang pendidikan, K.H. Abdul Halim juga ikut berjuang dalam bidang politik. Bahkan bisa dikatakan K.H. Abdul Halim sebagai *the founding fathers* karena ikut terlibat secara langsung dalam penyusunan dasar negara ini.

Namun demikian, dalam konteks sekarang ada kecenderungan bahwa di kalangan masyarakat Majalengka sudah banyak yang melupakan jasa dan perjuangan K.H. Abdul Halim. Secara lebih khusus, bisa jadi di kalangan generasi muda dewasa ini mereka mengenal K.H. Abdul Halim mungkin hanya dari nama besarnya yang diabadikan dalam nama sebuah jalan raya di kota Majalengka. Sebaliknya, banyak diantara mereka banyak yang tidak tahu jejak dan berbagai bentuk perjuangan yang pernah dilakukan oleh K.H. Abdul Halim di dalam bidang politik dari semenjak masa pergerakan nasional sampai dengan masa kemerdekaan Indonesia.

Permasalahan ini tampaknya merupakan sebuah pandangan yang sangat ironis dan tidak perlu muncul ke permukaan, karena betapa tidak bahwa seorang K.H. Abdul Halim juga berkiprah di dalam bidang politik dari semenjak zaman pergerakan nasional sampai dengan zaman Indonesia telah merdeka, namun demikian masih banyak di antara masyarakat Majalengka yang sudah tidak mengetahui jejak dan perjuangannya. Berangkat dari permasalahan tersebut dan realita diatas, akhirnya dalam benak penulis muncul pertanyaan mengenai bagaimana kiprah K.H. Abdul Halim di dalam bidang politik dari semenjak masa pergerakan nasional sampai dengan masa Indonesia telah merdeka.

Sedangkan untuk pemilihan kurun waktu yang dipilih oleh penulis dimulai dari tahun 1912 karena pada tahun itu K.H. Abdul Halim memulai kiprahnya dalam bidang politik dengan menjadi pemimpin Syarekat Islam cabang Majalengka. Kemudian kurun waktu penulisan skripsi ini diakhiri pada tahun 1955 karena pada tahun tersebut K.H. Abdul Halim terpilih menjadi anggota konstituante dan ketika menjadi anggota konstituante kondisi kesehatan K.H. Abdul Halim sudah mulai terganggu dan menyebabkan kiprahnya dalam bidang politik kurang begitu aktif.

Hal-hal yang telah disampaikan di atas, kemudian dijadikan dasar oleh penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kiprah K.H Abdul Halim dalam bidang politik. Dengan demikian penulis memilih untuk mengangkat judul **“Kiprah K.H Abdul Halim Dalam Bidang Politik Tahun 1912-1955”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan pokoknya adalah “Bagaimana Kiprah K.H. Abdul Halim dalam bidang Politik pada kurun waktu tahun 1912 sampai dengan 1955”.

Sementara untuk membatasi kajian penelitian ini, maka diajukan beberapa pertanyaan sekaligus sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan dari K.H. Abdul Halim?
2. Bagaimana pemikiran-pemikiran politik K.H. Abdul Halim?
3. Bagaimana peran politik K.H. Abdul Halim dari masa penjajahan hingga kemerdekaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah dan pembatasan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kiprah K.H. Abdul Halim dalam dunia

politik dari kurun waktu tahun 1912 sampai dengan 1955. Adapun tujuan-tujuan khususnya antara lain :

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan dari K.H. Abdul Halim
2. Mengidentifikasi pemikiran-pemikiran seorang K.H. Abdul Halim tentang politik.
3. Mendeskripsikan kiprah dan sepak terjang K.H. Abdul Halim di bidang politik dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu dari masa penjajahan hingga kemerdekaan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam mengangkat sosok tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Majalengka yaitu K.H. Abdul Halim yang kurang begitu dikenal oleh masyarakat Majalengka.
2. Memperkaya tulisan-tulisan tentang perjuangan dan kiprah K.H. Abdul Halim khususnya dalam bidang politik.
3. Hasil tulisan ini sebagai sumbangan informasi terhadap perjuangan dan pengaruh pemikiran K.H. Abdul Halim dalam bidang politik.
4. Menambah wawasan guna mendapat nilai tambah pengetahuan dalam mata pelajaran sejarah di sekolah sebagai perluasan materi mata pelajaran sejarah kelas XI yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Ideologi dan Organisasi Pergerakan Nasional

#### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

BAB I merupakan pendahuluan dari penulisan. Dalam bab ini, penulis berusaha untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi. Bab ini

berisi latar belakang masalah yang menguraikan mengenai gambaran umum tentang kondisi dan keadaan organisasi yang berazaskan Islam ketika memasuki fase pergerakan nasional dan juga sosok K.H. Abdul Halim. Untuk memperinci dan membatasi permasalahan agar tidak melebar maka dicantumkan rumusan dan batasan masalah sehingga dapat dikaji secara khusus dalam penulisan ini. Pada akhir dari bab ini akan dimuat tentang metode dan teknik penelitian, juga sistematika penulisan yang akan menjadi kerangka dan pedoman penulisan karya ilmiah ini.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Dalam bab ini dipaparkan mengenai sumber-sumber buku dan daftar literatur lainnya yang digunakan sebagai referensi yang dianggap relevan. Disini akan dijabarkan mengenai daftar literatur yang dipergunakan untuk mendukung penulisan terhadap permasalahan yang dikaji. Bab ini juga menyajikan teori-teori yang dipakai untuk menunjang penulisan skripsi ini.

BAB III, Metodologi Penelitian. Bab ini mengkaji tentang langkah-langkah yang dipergunakan dalam penulisan berupa metode penulisan dan teknik penelitian yang menjadi titik tolak penulis dalam mencari sumber serta data-data, pengolahan data dan cara penulisan. Dalam bab ini juga, penulis berusaha memaparkan metode yang digunakan untuk merampungkan rumusan penelitian. Semua prosedur serta tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melakukan penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir diuraikan secara rinci dalam bab ini. Adapun metode yang digunakan adalah metode historis dan teknik yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara.

BAB IV, Kiprah K.H. Abdul Halim Dalam Bidang Politik Tahun 1912-1955. Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai Kiprah K.H. Abdul Halim Dalam Bidang Politik Tahun 1912-1955. Penulis membagi dalam tiga pokok bahasan, yang pertama adalah tentang latar belakang kehidupan K.H. Abdul Halim. Kemudian yang kedua adalah tentang pemikiran-pemikiran politik K.H. Abdul Halim dan yang

ketiga adalah kiprah K.H. Abdul Halim dalam bidang politik dari masa penjajahan sampai dengan masa kemerdekaan Indonesia.

BAB V, Kesimpulan. Bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian penulisan karya ilmiah yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan dan batasan masalah. Bab terakhir ini berisi suatu kesimpulan dari pembahasan pada bab empat dan hasil analisis yang penulis lakukan merupakan kesimpulan secara menyeluruh yang menggambarkan Kiprah K.H. Abdul Halim dalam bidang politik kurun waktu tahun 1912 sampai dengan tahun 1955 berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini.